

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Pintu pohan meranti merupakan kecamatan yang terletak di kabupaten Toba Samosir. Kecamatan Pintu Pohan Meranti sendiri memiliki luas wilayah 277,27 km² atau 13,71% dari total luas Kabupaten Toba Samosir.

Kecamatan Pintu Pohan Meranti berada pada 2°49' - 2°58' Lintang Utara dan 99°20' - 99°44' Bujur Timur. Kecamatan Pintu Pohan Meranti berada diatas sekitar 120 hingga 1.200 meter dari permukaan laut. Beberapa desa di Kecamatan Pintu Pohan Meranti dilalui oleh Sungai Asahan, dimana aliran Sungai Asahan tersebut digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Waduk Sigura-Gura yang merupakan waduk kedua terbesar di Indonesia terletak di Kecamatan Pintu Pohan Meranti digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik untuk pabrik aluminium (PT. Inalum). Sekitar 43,77% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Pintu Pohan Meranti merupakan hutan negara jenis Hutan Lindung.

Tabel 1. Batas Wilayah

Utara	Kabupaten Asahan
Selatan	Kecamatan Habinsaran dan Silaen
Barat	Kecamatan Parmaksian dan Siantar Narumonda
Timur	Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pintu_Pohan_Meranti,_Toba_Samosir

2. Sejarah Kecamatan

Desa-desanya yang ada di wilayah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dahulunya berada di antara pemerintahan Kecamatan Porsea (Desa Ambar Halim, Halado, Pintu Pohan, dan Pintu Pohan Dolok) dan Kecamatan Habinsaran (Desa Meranti Barat, Meranti Tengah, Meranti Timur, dan Meranti Utara).

Kemudian sekitar tahun 1983 diadakan pemekaran Kecamatan Porsea oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Desa Ambar Halim, Halado, Meranti Barat, Pintu Pohan, Pintu Pohan Dolok, Sibide, dan Sibide Barat menjadi Kecamatan Perwakilan yang ibukotanya Pintu Pohan atau disebut dengan Kecamatan Perwakilan Pintu Pohan. Sedangkan Kecamatan Habinsaran dimekarkan menjadi Kecamatan Perwakilan yang terdiri dari Desa Meranti Utara, Meranti Timur, Meranti Barat dan Meranti Tengah yang ibukotanya Meranti atau disebut dengan Kecamatan Perwakilan Meranti. Kemudian sekitar tahun 1988 Kecamatan Perwakilan Pintu Pohan digabung dengan Kecamatan Perwakilan Meranti yang diberi nama Kecamatan Pembantu Pintu Pohan Meranti.⁵²

Ketika pembentukan Kabupaten Toba Samosir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1998, Pintu Pohan Meranti masih memiliki status sebagai Kecamatan Pembantu. Pembentukan Kecamatan Pintu Pohan Meranti didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir No. 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Pintu Pohan Meranti (didefenitikan menjadi kecamatan), Kecamatan Ajibata dimekarkan dari Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Ronggur Nihuta dimekarkan dari Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Uluan didefenitikan menjadi kecamatan. Kecamatan Pintu Pohan Meranti ketika terbentuk semula terdiri dari sepuluh desa. Namun sejak awal tahun 2009 berkurang menjadi tujuh desa, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Pintu_Pohan_Meranti,_Toba_Samosir

No. 4 Tahun 2008, tiga desa (Meranti Barat, Sibide, dan Sibide Barat) dialihkan ke Kecamatan Silaen.⁵³

Kecamatan Pintu Pohan Meranti terdiri dari 7 desa yang terbagi habis dalam 31 dusun. Desa Pintu Pohan adalah ibukota dan pusat pemerintahan Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Desa Meranti Tengah merupakan desa dengan wilayah terluas yaitu 98,85 km² atau 35,65% dari total luas Kecamatan Pintu Pohan Meranti, sementara Desa Pintu Pohan Dolok merupakan desa terkecil yaitu 13,62 km² atau 4,91% dari total luas Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Desa Meranti Timur merupakan desa yang paling jauh dari ibukota Kecamatan Pintu Pohan Meranti yaitu berjarak sekitar 35 kilometer.⁵⁴

Mayoritas penduduk Kecamatan Pintu Pohan Meranti berasal dari suku Batak Toba. Mayoritas penduduk Kecamatan Pintu Pohan Meranti memeluk agama Kristen. Kecamatan Pintu Pohan Meranti juga terdapat penduduk yang meyakini ajaran aliran kepercayaan seperti Parmalim, penduduk yang beraliran kepercayaan Parmalim dominan terdapat di Desa Meranti Timur dan Meranti Utara. Di Kecamatan Pintu Pohan Meranti terdapat 35 sarana ibadah yang terdiri dari 24 bangunan Gereja, 6 Masjid.⁵⁵

3. Upacara *Mebat & Mangindahani*

Upacara adat merupakan salah satu tradisi di masyarakat tradisional yang dianggap mempunyai nilai-nilai sebagai pendukung kehidupan Di dalam tradisi adat Batak Toba perempuan mempunyai dua akses dalam memperoleh harta warisan yaitu dengan cara melakukan upacara adat *mebat* dan *mangindahani*, dimana keduanya mempunyai perbedaan yaitu :

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pintu_Pohan_Meranti,_Toba_Samosir

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

Tabel 2. Perbedaan Upacara Mebat & Mangindahani

	<i>Mebat</i>	<i>Mangindahani</i>
Ruang Lingkup	Upacara yang lingkupnya kecil dengan jumlah yang hadir kurang dari 100 orang.	Upacara yang lingkupnya lebih besar dengan jumlah yang hadir lebih dari 100 orang.
Makanan yang disediakan	Memotong babi.	Memotong kerbau atau sapi.
Pihak yang hadir	Dihadiri anak perempuan dan suaminya, petuah adat, <i>dongan tubu</i> , dan anak laki-laki dari orangtua perempuan dan masyarakat sekitar.	Dihadiri anak perempuan dan suaminya, petuah adat, <i>dongan tubu</i> , kedua orangtua dan anak laki-laki dari orangtua perempuan
Diberikan harta warisan	Pada saat menikah dan setelah anak perempuannya dianggap sudah dewasa.	Pada saat anak perempuannya dan suaminya telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak.
Harta warisan berupa	Diberikan harta warisan 1/3 kepada perempuan berupa tanah (sawah, ladang, tanah)	Diberikan harta warisan 1/3 kepada perempuan berupa tanah (sawah, ladang, tanah)
Tempat upacara	Di rumah orangtua perempuan	Di rumah pihak suami dari perempuan
Peran pihak2	<ul style="list-style-type: none"> -Orangtua perempuan berperan sebagai pihak yang mewarisi. -Perempuan sebagai pihak yang diberikan harta warisan. -<i>Dongan Tubu</i>, Masyarakat, suami perempuan beserta anak laki-laki dari orangtua perempuan berperan sebagai saksi atas pemberian warisan dari orangtua perempuan. - Petuah adat berperan menjadi saksi dalam upacara serta mengarahkan tatanan upacara yang benar menurut adat istiadat yang berlaku di daerahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> -Orangtua perempuan berperan sebagai pihak yang mewarisi. - Perempuan, suami beserta anaknya berperan sebagai pihak yang meminta harta warisan kepada orangtua dari perempuan. - <i>Dongan Tubu</i>, Masyarakat, suami perempuan beserta anak laki-laki dari orangtua perempuan berperan sebagai saksi atas pemberian warisan dari orangtua perempuan. - Petuah adat berperan menjadi saksi dalam upacara serta mengarahkan tatanan upacara yang benar menurut adat istiadat yang berlaku di daerahnya.

Simbol yang digunakan	-Pihak Perempuan memberikan <i>Parjambaron</i> (pembagian daging babi) kepada orangtua, sedangkan pihak orangtua memberikan Ulos.	- Ulos Batak Toba (<i>ulosnasouraburuk</i>).
-----------------------	---	--

Sumber Bapak.Arifin Simamora, Data terolah 2017

Perbedaan ini merupakan hasil dari wawancara penulis terhadap salah satu petuah adat yang berada di desa Pintu Pohan Meranti yaitu Bapak Arifin Simamora. Beliau juga menjelaskan secara spesifik mengenai upacara *mebat* dan *mangindahani*.

1. Upacara *Mebat*

Kata *mebat* berarti pihak laki-laki datang dengan istrinya datang kerumah pihak orangtua wanita membawa *indahan*. Upacara *mebat* merupakan upaya perempuan dalam tradisi adat Batak Toba untuk memperoleh harta warisan dari orangtuanya dimana acara ini ruang lingkup dalam proses pelaksanaannya lebih sedikit, kurang lebih 100 orang yang hadir dalam upacara tersebut dengan memanggil petuah adat, keluarga besarnya dan *dongan tubu* (teman semarga). Anak perempuan, suami dan orangtua dari pihak laki-laki datang secara langsung kerumah orangtuanya dengan membawa makanan seperti daging babi dan harus didengar langsung oleh anak laki-lakinya serta upacara ini dilakukan di rumah orangtua perempuan. Anak laki-laki merupakan anak yang paling dihargai dalam keluarganya sehingga pihak perempuan hanya dapat meminta 1/3 bagian dari harta orangtuanya dan harus berbentuk tanah baik sawah maupun ladang, sangat dilarang perempuan menerima uang, beras, dan rumah sedangkan pihak laki-

laki mendapat 2/3 harta warisan dan harta warisan bebas diberikan dalam bentuk apa saja.⁵⁶ Ketika perempuan itu melakukan mebat maka disitulah perempuan diberikan *pauseang* (pemberian). Tradisi Batak Toba sebenarnya tidak mengatakan bahwa itu adalah warisan tetapi pemberian. Prosesi acara *Mebat* biasanya kebanyakan diberikan pada saat anak perempuannya melakukan pernikahan, sehingga pada saat dia menikah sudah dapat bagian warisan dan tidak perlu meminta lagi. Perempuan diberikan *Mebat* biasanya pada saat anak perempuannya sudah dianggap dewasa oleh orangtuanya.

Tata cara dalam upacara mebat yaitu memberikan *ulos na souraburuk* secara simbolik kepada pihak perempuan. *Ulos na souraburuk* merupakan istilah pemberian harta warisan berupa ladang/ sawah yang didalam upacara akan disebutkan oleh orangtua perempuan sawah/ tanah yang diberikan itu dimana, karena pihak dongan tubu, petuah adat serta orangtua dari laki-laki merupakan sebagai saksi yang mendengar secara langsung. Pada zaman dahulu dalam pemberian harta warisan tidak secara tertulis hanya secara lisan sehingga para pihak orangtua beserta *dongan tubu*, petuah adat dan pihak laki-laki, perempuan sebagai saksi.⁵⁷

2. Upacara *Mangindahani*

Upacara *mangindahani* berarti harus mempunyai anak terlebih dahulu baru dilakukan upacara di tempat pihak suami, dimana dalam upacara tersebut pihak laki-laki meminta *indahan arian* kepada pihak orangtua perempuan. *Indahan arian* merupakan suatu bentuk warisan yang diberikan orangtua perempuan kepada anak perempuannya.

Upacara *mangindahani* merupakan upacara yang lingkupnya lebih besar dengan orang yang hadir lebih dari 100 orang dan dihadiri oleh pihak

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Arifin Simamora, Petuah adat di Pintu Pohan meranti. Senin 11 Desember 2018. Pukul 19.00 Wib.

⁵⁷ *Ibid*

orangtua laki-laki dan perempuan, laki-laki dari pihak perempuan, petua adat, teman sekampung dan *dongan tubu*. Upacara ini biasanya memotong sapi atau kerbau karena banyak yang hadir dalam acara tersebut. *Mangindahani* hanya dapat dilakukan setelah menikah dan mempunyai anak, jika belum mempunyai anak maka tidak boleh dilakukan acara mangindahani dan upacaranya dilakukan di rumah suaminya. Sama seperti *mebat* & *mangindahani* juga bagi pihak perempuan hanya dapat menerima 1/3 dari harta warisan orangtuanya tidak boleh lebih dan juga berupa tanah, sawah atau ladang. Bagi pihak perempuan, pemberian ladang dari orangtuanya dapat dijadikan sejarah buat kehidupannya bahwa dia merupakan bagian dari klan orangtuanya dengan diberikannya sebidang tanah tersebut.

Tata cara dalam upacara *mangindahani* yaitu dengan memberikan *indahan arian* sebagai suatu proses penerimaan secara simbolik sawah/ ladang kepada pihak anak laki-laki dan perempuan. Proses mangindahani hanya dapat dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki ketika mereka sudah mempunyai anak dan kemudian mendatangi pihak dari orang tua perempuan dengan membawa pihak *dongan tubu*, *dongan sahuta* dan petua adat sebagai pihak yang berdialog mengikuti tatanan yang berlaku.⁵⁸

Kedua proses upacara ini merupakan upaya yang sangat lazim dilakukan perempuan dalam memperoleh harta warisan (*paueang*), hanya dengan upacara ini perempuan dapat memperoleh harta warisan secara sah di mata adat Batak Toba. Perempuan tidak diperbolehkan menerima harta warisan dua kali, ketika telah melakukan upacara *mebat* maka upacara mangindahani tidak dapat dilakukan lagi. Proses acara di adat Batak Toba tidak dapat dilakukan dua kali, jadi ketika seseorang perempuan melakukan upacara *Mebat* maka tidak dapat melakukan upacara *mangindahani* lagi, begitu juga sebaliknya. Pada saat pembagian harta warisan masyarakat Batak Toba mengenal sebutan "***Harta Panjaean***" yang di berikan kepada anak laki-laknya sedangkan bagi anak perempuan yang meminta harta warisan

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Arifin Simamora, Petua adat di Pintu Pohan meranti. Senin 11 Desember 2108. Pukul 19.00 Wib.

kepada orangtuanya disebut “*Pauseang*” selain itu ada beberapa istilah yang sama dengan pauseang yaitu :

1. Ulos Naso Ra Buruk

Ulos Naso Ra Buruk adalah pemberian sebuah harta warisan kepada anak perempuannya, dimana sering diberikan pada acara pernikahan anak perempuannya yang berguna baginya pada saat membangun rumah tangganya.

2. Punsu Tali

Punsu Tali adalah pemberian harta warisan dari orangtuanya kepada anak perempuannya pada saat orangtuanya telah meninggal dunia. Sebelum ayahnya meninggal anak perempuan tersebut belum dapat menikmati harta warisan orangtuanya.

3. Indahan Arian

Indahan Arian adalah pemberian sebidang tanah kepada anak perempuannya ketika anak perempuannya telah mempunyai anak, sehingga ayahnya memberikan indahan arian kepada cucunya tersebut.

4. Dondon Tua

Dondon Tua adalah pemberian harta warisan dari ayahnya kepada anak perempuannya ketika perempuan tersebut telah mempunyai anak berupa hewan peliharaan dan emas, diberikan kepada perempuan sebagai bentuk hadiah kepada cucunya.

Upacara Mebat dan Mangindahani merupakan bentuk upacara yang dapat dilakukan oleh anak perempuan yang terlahir dengan keturunan Batak Toba, kedua upacara ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya agar pihak perempuan menerima harta warisan dari kedua orangtuanya walaupun harta warisan yang diterima hanya sedikit dan hanya berupa tanah, ladang, sawah. Ketika seorang anak perempuan merasa bahwa harus menerima harta warisan yang sama besar dengan seorang anak laki-laki maka hal ini tergantung kepada lingkungan dan orangtua perempuan tersebut. Di beberapa daerah perkotaan yang sudah tidak memegang erat pada tatanan adat Batak Toba

yang berlaku maka pembagian harta warisan yang sama rata antara laki laki dan perempuan dapat dilakukan karena aturan akan adat istiadat yang ditanamkan turun-menurun telah luntur.

Berbeda halnya di pedesaan yang masih memegang teguh tatanan adat istiadat, mereka harus tetap mematuhi dan mewarisinya kepada anak-anak nya agar budaya tersebut tidak luntur. Penulis melihat khususnya di daerah Pintu Pohan Meranti kebanyakan masyarakat masih berpegang teguh terhadap adat istiadat yang berlaku, dan mengacu pada tatanan adat sebagai pedoman mereka menjalankan kehidupan khususnya dalam pembagian harta warisan hampir tidak ada yang melanggar. Mereka menerima keadaan secara lapang dada jika tidak mendapatkan harta warisan karena mungkin orangtuanya tidak mempunyai harta yang dapat dibagikan.

Sistem pewarisan di masyarakat Batak Toba sangat dipengaruhi oleh keadaan situasional di tengah masyarakat itu sendiri dimana sistem adat ditarik dari garis patrilineal, sehingga yang berhak meneruskan dan menurunkan klan ayahnya adalah anak laki-laki dan seorang anak perempuan kelak jika ia telah menikah maka ia akan masuk ke klan suaminya sehingga tidak diberikan harta warisan yang sama dengan anak laki-lakinya.⁵⁹

Beberapa petuah adat di sekitar daerah Pintu Pohan Meranti juga memberikan tanggapannya ketika penulis mempertanyakan bagaimana seorang perempuan dapat memperoleh harta warisan dari orangtuanya sedangkan menurut tradisi Batak Toba, seorang laki-laki yang berhak sebagai ahli waris.

1. Menurut Bapak Rusman Marpaung

Dalam tradisi Batak Toba seorang wanita berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orangtua nya dengan melakukan acara *Mebat & Mangindahani* tersebut. Yang melibatkan orangtua, petuah adat, perempuan, suami perempuan, orangtua suami, raja adat suaminya (*Hula-Hula*).

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Arifin Simamora, Petuah adat di Pintu Pohan meranti. Senin 11Desember 2108. Pukul 19.00 Wib.

Perempuan meminta *ulosnasoraburuk* yaitu warisan berupa tanah darat/sawah, tidak boleh berbentuk uang karena dilarang oleh adat.⁶⁰

Pemberian tanah tersebut memberikan makna bahwa tanah tersebut akan menjadi sejarah karena akan diwariskan ke keturunannya berikutnya. Saat itu kewajiban pihak suami dari perempuan memberikan uang kepada pihak orangtua perempuan yang disebut *Masituak Natonggi*. Uang yang diberikan oleh pihak suami tersebut merupakan sebagai pengganti surat *segel* (lebih tinggi dari surat perjanjian). Pelaksanaan *Mebat* dilakukan di acara di tempat orangtuanya pihak perempuan sedangkan *Mangindahani* dilakukan di tempat suami dari perempuan. Pemberian harta warisan haruslah sesuai mekanisme adat, jika tidak sesuai mekanisme maka tidak dapat diberikan secara sembarangan. Pihak perempuan haruslah menerima pemberian sesuai keinginan orangtuanya. Seberapapun yang diberikan haruslah diterima dengan lapang dada, karena dalam tradisi Batak harta warisan diberikan ke pihak perempuan karena akan menjadi sejarah.

Bila suatu hari ladang/sawah tersebut akan dijual maka harus menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang mewarisi. Warisan ini tidak dapat diperjual belikan kepada orang lain ketika pihak keluarga mampu membeli maka harus dibeli, jika pihak keluarga tidak sanggup untuk membeli maka dapat di perjual belikan, hal ini harus melalui kesepakatan semua pihak dalam keluarga. Menurut Bapak Rusman Marpaung;

Perempuan yang telah melakukan acara *mebat* maka tidak dapat melakukan acara *mangindahani* lagi, karena dalam tradisi batak jika telah melakukan salah satu acara tersebut maka tidak boleh di lakukan lagi, cukup hanya sekali. Jika orang tua telah memberikan *mebat* pada saat pernikahan perempuan maka *mangindahani* tidak dapat di ajukan lagi.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rusman Marpaung, Petuah adat di Pintu Pohan Meranti, Selasa 12 Desember tahun 2017. Pukul 10.00 Wib.

Kegiatan seperti ini sudah lazim dijalankan dan beberapa orangtua yang mempunyai harta warisan pada dasarnya mempunyai inisiatif memberikan kepada *boru* (anak perempuan)nya, tetapi jika tidak ada maka tidak akan ada yang diberikan.

2. Menurut Bapak Tinglof Simangunsong (Oppung Santa)

Menurutnya pihak laki-laki yang berhak membagi harta warisan kepada perempuan, karena bagi perempuan diberikan harta warisan hanya berupa pemberian dan dilakukan dengan adat. Dalam tradisi Batak Toba orangtua memberikan rumah kepada anak laki-laki (bungsu) secara adat dikarenakan orangtua tidak mempunyai harta jadi memberikan rumah tersebut kepada anak laki-laki bungsu nya. Perempuan dilarang menerima pemberian harta warisan berupa uang dan rumah. Beberapa cara perempuan memperoleh harta warisan di Batak Toba yaitu:

1. Membawa *sipanganon* (makanan) kerumah orangtua nya dan harus disaksikan oleh anak laki-lakinya.
2. Acara *mangindahani* kepada anak perempuan yaitu dengan membuat pesta *mangindahani* dan meminta *indahan arian* (harta warisan) kepada orangtua perempuan tersebut.
3. Untuk membangun rumah, laki-laki berhak meminta kepada orangtua wanita walaupun sedikit. Tidak ada paksaan berapa besar tetapi merupakan kewajiban.⁶¹

Pembagian harta warisan yang tidak setara ini telah menjadi mindset di semua orang batak bahwa anak perempuan mendapat 1/3 dari harta warisan sedangkan anak laki-laki mendapat 2/3 dari harta warisan. Pihak perempuan tidak dapat membawa harta warisan secara sembarangan jadi harus melalui pengetahuan dari pihak laki-laki dan melakukan kompromi. *Mangindahani* hanya dapat dilakukan setelah menikah dan mempunyai anak, jika belum

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Tinglof Simangunsong, Petuah adat di Pintu Pohan Meranti, Kamis 14 Desember 2017. Pukul 18.00 Wib.

mempunyai anak maka tidak boleh dilakukan acara *mangindahani*, karena mangindahani merupakan kegiatan pesta yang lebih besar dan banyak mengundang warga serta pihak keluarga dan *dongan tubu*. Bapak Tinglof Simangunsong juga mengatakan bahwa pernah terjadi perseteruan diantara anak Tumpal Dorianus Pardede mengenai pembagian harta warisan dimana perempuan ingin pembagian harta warisan di berikan secara sama rata namun yang terjadi bahwa adat Batak tetap menjadi acuannya, sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari kasus tersebut.⁶²

Penjelasan ini membuktikan bahwa tradisi di masyarakat Batak Toba khususnya di daerah Pintu Pohan Meranti masih tetap berlangsung dan menjadi pedoman yang diwariskan kepada anak-anaknya. Segala bentuk upacara perkawinan dan pewarisan masih tetap berlangsung dan dijalankan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sehingga dalam upaya wanita memperoleh harta warisan yang sama besar dengan laki-laki sangat tidak memungkinkan dilakukan di daerah ini. Keterpakuan atas adat istiadat masih sangat dipegang teguh oleh setiap masyarakat sekitar, dan ketika terjadi yang tidak sesuai adat maka dapat dilakukan musyawarah/mufakat secara bersama-sama.

Pihak perempuan yang diwawancarai adalah mereka yang lahir dari orangtua keturunan Batak Toba dan dibesarkan di daerah Pintu Pohan Meranti, dengan berbagai latar belakang, pekerjaan, umur dan pendidikan yang berbeda-beda. Ketika penulis mewawancarai perempuan yang berada dilingkungan ini mengenai bagaimanakah tanggapan dan pandangan mereka mengenai pembagian harta warisan yang hanya dapat dilakukan dengan upacara *Mebat* dan *Mangindahani*. Sebagain besar dari narasumber yang diwawancarai mereka melakukan upacara Mebat untuk memperoleh warisan, beberapa narasumbernya seperti:

⁶² Wawancara dengan Bapak Tinglof Simangunsong, Petuah adat di Pintu Pohan Meranti, Jumat 15 Desember 2017. Pukul 18.00 Wib.

1. Ibu Mintauli Tambunan

Mintauli Tambunan berusia 57 tahun, bekerja Pegawai negeri sipil di mana anak laki-laki dan perempuan dalam keluarganya dibedakan besar jumlah harta warisannya. Menurutny:

Saya mendapatkan harta warisan berupa sawah yang diberikan oleh orangtua sewaktu menikah yang disebut *pauseang* (Mebat). Saya 7 bersaudara dimana laki-laki 3 orang dan perempuan 4 orang, jadi anak perempuannya dapat tetapi tidak sesuai dengan laki laki. Saya merasa pemberian harta warisan dengan upacara mebat cukup adil, karena saya bersyukur diberikan tidak perlu memaksa dan tidak perlu meminta bagian lebih banyak. Jika diberikan oleh orangtua maka diterima, tetapi jika tidak diberikan maka harus lapang dada.⁶³

Pihak perempuan dari keluarga nya ibu Mintauli sangat bersyukur dan menerima lapang dada sebarangpun yang diberikan kepadanya. Mereka sebagai anak perempuan juga tidak sakit hati dan memberikan komentar bawah memang laki-laki wajar diberikan harta warisan yang lebih banyak karena mereka menghidupi keluarganya.

2. Ibu Hotmauli Doloksaribu

Hotmauli Doloksaribu berusia 58 tahun, bekerja sebagai pegawai negeri sipil dimana anak laki-laki dan perempuan dalam keluarganya dibedakan besar jumlah harta warisannya. Menurutny:

Saya mendapatkan harta warisan berupa sawah yaitu dengan melakukan upacara *Mebat*. Saya mendapat harta warisan ketika setelah setahun menikah dengan suaminya. Saya 6 bersaudara dimana laki-laki 3 orang dan perempuan 4 orang, jadi anak perempuan mendapat bagian tanah paling kecil tidak sesuai dibandingkan dengan anak laki-laki. Saya merasa tidak ada kecemburuan karena harta warisan itu adalah hak dari laki-laki didalam adat Batak Toba bahwa memang benar laki-laki sebagai penerus dikeluarga dan sudah seharusnya menerima

⁶³ Wawancara dengan Ibu Mintauli Tambunan, Perempuan di Pintu Pohan Meranti, Rabu 20 Desember 2017. Pukul 17.00 Wib.

bagian dari harta warisan yang lebih banyak dan saya mendapat harta warisan dari mertua saya.⁶⁴

Pihak perempuan dari keluarga nya ibu Hotmauli Doloksaribu merasa bahwa acara *mebat* ini sudah memberikan keadilan bagi dirinya walaupun mendapat bagian hanya sedikit tapi setidaknya dapat dipergunakan untuk lahan bertani atau membangun rumah bagi keluarganya.

3. Ibu Elida Pangaribuan

Elida Pangaribuan berusia 63 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga di mana anak laki-laki dan perempuan dalam keluarganya dibedakan besar jumlah harta warisannya. Menurutnya:

Saya mendapatkan tanah (*panjaean*) melalui upacara *mebat*, yang diberikan kepadanya saat acara pernikahan. Saya 9 bersaudara dimana anak laki-laki 5 orang dan anak perempuan 4 orang, jadi anak perempuan di keluarga saya mendapat bagian yang lebih kecil. ketika orangtua saya mempunyai harta warisan tapi tidak diberikan kepada anak perempuannya maka saya berhak menuntut nya agar diberikan walaupun sedikit. Saya merasa ketika diberikan harta warisan lebih banyak kepada laki-laki maka saya menerima dan tidak memberikan respon yang berlebihan, karena menganggap adat istiadat mengatur demikian. Upacara *mebat* ini terasa masih adil bagi saya karena dengan pemberian yang sedikit dari orangtua kandung sehingga saya dapat mengingat terus sampe saya tua⁶⁵.

Pihak perempuan dari keluarga nya Ibu Elida Pangaribuan tidak mempunyai saran karena, dimasyarakat masih tertatanam kepercayaan yang sangat tinggi pada adat istiadat yang berlaku.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Hotmauli Doloksaribu, Perempuan di Pintu Pohan Meranti, Sabtu 16 Desember 2017. Pukul 17.00 Wib.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Elida Pangaribuan, Perempuan di Pintu Pohan Meranti, Rabu 20 Desember 2017. Pukul 20.00 Wib.

4. Ibu Tiamin Siagian

Tiamin Siagian berusia 62 tahun pensiunan perawat diperusahan PT Inalum, di mana anak laki-laki dan perempuan dalam keluarganya dibedakan besar jumlah harta warisannya

Saya mendapatkan harta warisan berupa sawah/tanah dengan memberikan indahan arian dan tanah tersebut diberikan atas inisiatif dari orangtuanya sendiri. Saya 6 bersaudara dimana laki laki 3 orang dan perempuan 3 orang, jadi anak perempuan mendapatkan harta warisan yang lebih sedikit, sedangkan pihak laki-laki lebih banyak. Saya merasa bahwa pemberian harta warisan yang dilakukan oleh orangtua nya tidak adil karena ia selaku perempuan mendapatkan bagian yang sedikit. Saya mendapat 1/3 tanah dari tanah orangtua saya, sedangkan pihak laki-laki mendapat lebih banyak dan mendapat harta warisan rumah.⁶⁶

Pihak perempuan dari keluarganya Ibu Tiamin Siagian memberikan masukan bahwa seharusnya diberikan harta warisan yang sama rata tanpa ada pengecualian antara laki laki dan perempuan karena mereka lahir dari rahim yang sama. Sejauh ini ibu tiamin tidak dapat memperjuangkan harta warisannya karena peraturan adat yang ketat dan mematuhi orangtua sehingga ia menerima sawah/tanah saja. Ibu tiamin juga mengatakan bahwa ia kelak akan memberikan harta warisan yang sama besarnya bagi anak laki-laki dan perempuannya.

5. Ibu Siti Fatima Gultom

Ibu Siti Fatima Gultom berusia 32 tahun bekerja sebagai bidan di puskesmas Pintu Pohan Meranti.

Saya belum mendapatkan harta warisan karena orangtuanya masih hidup. Saya bersaudara dimana laki-laki 5 orang dan perempuan 1 orang. Jadi sebelum saya menikah sudah diberitahukan akan mendapatkan tanah dan isinya. saya

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Tiamin Siagian, Perempuan di Pintu Pohan Meranti, Selasa 19 Desember 2017. Pukul 17.00 Wib.

berharap mendapatkan harta warisan yang sama rata dengan laki-laki dan akan menuntut apabila ia tidak mendapatkan sama sekali, namun jika ia hanya mendapatkan bagian sedikit ia tetap bersyukur karena sejauh ini ia dapat membiayai hidupnya dan keluarganya karena mempunyai pekerjaan yang bagus. Saya mersa dengan menyekolahkan saya sampai sarjana merupakan suatu bentuk pemberian harta warisan yang cukup berharga buat dirinya.⁶⁷

Menurut pendapat Ibu Siti Fatima Gultom perempuan diberikan pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan karena bagaimanapun seorang anak mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga dan merawat orangtuanya ketika otangtuanya tua nanti. Namun saya juga harus melihat bahwa adat yang berlaku dsini masih sangat kental sehingga saya hanya mengikuti dan hanya bisa memberikan saran saja.

6. **Oppung Ayu Dolosaribu**

Oppung Ayu Doloksaribu, berusia 71 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Saya menerima harta warisan setelah menikah dengan melakukan upacara Mangindahani, upacara tersebut dilakukan dengan meminta indahan arian kepada orangtuanya dengan mengundang teman sekampung, dongan tubu (teman semarga), dan kedua orangtua serta pihak laki-laki. Saya 5 bersaudara dimana laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang. Saya menerima bagian sebuah tanah di Janjimatogu yang digunakan sebagai lahan untuk bertani, sedangkan pihak laki-laki dari keluarga mendapat lebih banyak, dan mendapat peninggalan rumah dari orantuanya. saya berinisiatif melakukan upacara mangindahani karena melihat orangtua saya mempunyai harta warisan jadi ketika saya mempunyai anak pertama maka saya langsung meminta *indahan arian*.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Fatima Gultom, Perempuan di Pintu Pohan Meranti, Minggu 17 Desember 2017. Pukul 14.30 Wib.

⁶⁸ Wawancara dengan Oppung Ayu Doloksaribu, Perempuan di Pintu Pohan Meranti, Sabtu 16 Desember 2017. Pukul 13.00 Wib.

Pihak perempuan dari keluarga Oppung Ayu juga berpendapat bahwa wajar saja perempuan diberikan lebih sedikit dari pihak laki-laki karena perempuan akan mengikuti pihak laki-laki. Beliau juga berpendapat bahwa jika ia tidak dapat tidak apa-apa asalkan ia dapat memakai tanah/ ladang orangtuanya untuk bertani. Beliau melakukan upacara Mangindahani karena pada saat pernikahannya tidak diberikan harta warisan sehingga pada saat beliau mempunyai anak dan sudah tua baru ia melakukan upacara mangindahani.

B. Pembahasan

1. Upacara *Mebat* dan *Mangindahani* sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan Hak-Hak perempuan sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian pihak perempuan dapat memperoleh harta warisan sesuai adat Batak Toba yaitu dengan *Mebat* dan *Mangindahani*. Upacara *Mebat* dilakukan kepada perempuan yang telah dianggap dewasa atau ketika perempuan melakukan pernikahan dan upacara mangindahani dilakukan ketika seseorang perempuan itu telah mempunyai anak. Hampir semua perempuan di daerah ini menjalankan tradisi *Mebat* dan *Mangindahani* karena dianggap sebagai suatu tata aturan yang masih hidup dan berjalan serta diakui ditengah masyarakat.

Beberapa narasumber seperti Ibu Mintauli Tambunan mengatakan bahwa diberikan harta warisan berupa sawah oleh orangtuanya sewaktu menikah yang disebut *Pauseang (Mebat)*. Ibu Hotmauli Doloksaribu mengatakan saya mendapatkan harta warisan berupa sawah yaitu dengan melakukan upacara *Mebat*. Ibu Elida Pangaribuan mengatakan ia mendapatkan tanah (*Panjaean*) melalui upacara *Mebat*, yang diberikan

kepadanya saat acara pernikahan. Ibu Tiamin Siagian mengatakan bahwa ia mendapatkan harta warisan berupa sawah/tanah dengan memberikan indahan arian dan tanah tersebut diberikan atas inisiatif dari orangtuanya sendiri, dan Oppung Ayu Doloksaribu mengatakan bahwa ia menerima harta warisan setelah menikah dengan melakukan upacara *Mangindahani*, upacara tersebut dilakukan dengan meminta indahan arian kepada orangtuanya. Oppung Ayu Doloksaribu melihat bahwa tradisi adat istiadat yang berlaku di masyarakat Batak Toba selain melakukan upacara *Mebat* dapat juga melakukan Upacara *Mangindahani* karena kedua upacara ini adalah cara perempuan memperoleh hak dari harta warisan orangtuanya. Pada waktu menikah orangtuanya tidak memberikan harta warisan maka ia berinisiatif melakukan upacara melalui *Mangindahani* dengan tujuan agar mendapatkan tanah/lahan dari orangtuanya, dan akhirnya Oppung Ayu Doloksaribu mendapatkan lahan/tanah yang berada di daerah Janjimatogu. Tanah tersebut digunakan Oppung Ayu Doloksaribu sebagai sumber nafkah dengan menanam padi.

Sebagian besar narasumber diberikan harta warisan melalui *Mebat* dan atas dasar inisiatif orangtua dalam pemberiannya karena orangtua memberikan harta warisan tersebut pada saat anak perempuannya melakukan pernikahan sebagai bentuk bahwa perempuan juga termasuk dalam klan orangtuanya, selain itu tanah/lahan tersebut agar dapat dipergunakan sebagai sumber mencari nafkah dengan bercocok tanam apabila dalam kehidupan rumah tangga mengalami kesusahan tanah/lahan tersebut membantu anak perempuannya.

Upacara *Mebat & Mangindahani* merupakan suatu cara bagi perempuan dalam memperoleh harta warisan karena dalam tatanan adat istiadat Batak Toba hanya dengan kedua upacara inilah mereka dapat memperoleh akses terhadap harta warisan orangtuanya. Kepatuhan akan adat yang berlaku membuat hampir semua narasumber memperoleh harta warisan harus melalui kedua upacara tersebut agar tidak melanggar tatanan adat yang berlaku ditengah masyarakat Pintu Pohan Meranti. Kedua upacara ini dianggap telah memberikan kepuasan bagi perempuan walaupun menerima sedikit daripada tidak menerima sama sekali.

Jika ingin mengacu pada kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan seperti yang diatur pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Persamaan Gender. Dimana kesetaraan gender ini sebuah proses agar menjadi adil bagi pihak perempuan dan laki-laki. Namun hal ini belum terjadi di daerah Pintu Pohan Meranti yang masih menganggap bahwa seorang perempuan adalah pihak yang akan menikah dengan laki laki dari marga/klan orang lain sehingga tidak mendapat jumlah harta warisan yang sama dengan pihak laki-laki, sampai sejauh ini kebanyakan masyarakat Batak Toba khususnya di daerah Pintu Pohan Meranti beranggapan bahwa perempuan nantinya hanya pihak yang akan dinikahkan dan harus mengikuti klan suaminya, sehingga mereka menerima seberapa pun bentuk harta warisan yang diberikan orangtuanya dan beranggapan bahwa mereka disekolahkan sampai sarjana merupakan suatu bentuk harta warisan dari orangtuanya.

Hal ini didukung oleh pendapat Oppung Ayu Doloksaribu menyatakan bahwa bahwa wajar saja jika perempuan diberikan lebih sedikit dari pihak laki-laki karena dia akan mengikuti klan pihak laki laki. Beliau juga berpendapat bahwa jika ia tidak dapat tidak apa-apa asalkan ia dapat memakai tanah/ ladang orangtuanya untuk bertani.⁶⁹ Dan pendapat Ibu Hotmauli Doloksaribu yang menyatakan bahwa “Tidak ada kecemburuan diantara kedua pihak karena harta warisan itu adalah hak dari laki-laki dalam adat Batak Toba”. Laki-laki sebagai penerus di keluarga dan sudah seharusnya menerima bagian dari harta warisan yang lebih banyak dan perempuan mendapat harta warisan dari mertuanya.⁷⁰ Sedangkan pendapat Ibu Siti Fatima Gultom menyatakan jika ia hanya mendapatkan bagian sedikit ia tetap bersyukur karena sejauh ini ia dapat membiayai hidupnya dan keluarganya karena mempunyai pekerjaan yang bagus. Ia juga menyatakan orangtuanya telah menyekolahkan sampai sarjana, sehingga ia berpendapat dengan menyekolahkan saja merupakan suatu bentuk pemberian harta warisan yang berharga bagi dirinya dan untuk kehidupannya.⁷¹

Penulis menganalisis bahwa di dalam adat batak Toba, perempuan adalah pihak yang akan mengikuti klan dari suaminya ketika perempuan tersebut melangsungkan pernikahan/perkawinan. Maka pihak perempuan tersebut tidak lagi berada di klan ayahnya dan harus mengikuti klan dari

⁶⁹ Wawancara dengan Oppung Ayu Doloksaribu, perempuan di Pintu Pohan Meranti, Sabtu 16 Desember 2017. Pukul 13.00 Wib.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Hotmauli Doloksaribu, perempuan di Pintu Pohan Meranti, Sabtu 16 Desember 2017. Pukul 17.00 Wib.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Siti Fatima Gultom, perempuan di Pintu Pohan Meranti, Minggu 17 Desember 2017. Pukul 14.30 Wib.

suaminya. Dapat dikatakan aturan adat istiadat yang patrilineal ditengah lingkungan masyarakat Batak Toba dengan memberikan anak laki-laki memperoleh akses yang lebih banyak terhadap harta warisan dibandingkan dengan anak perempuan masih berjalan, dan diyakini sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi.

Hal ini terlihat dari pendapat Bapak Arifin Simamora sebagai petuah adat yang mengatakan bahwa Anak laki-laki merupakan anak yang paling dihargai dalam keluarganya sehingga pihak perempuan hanya dapat meminta 1/3 bagian dari harta orangtuanya dan harus berbentuk tanah baik sawah maupun ladang, sangat dilarang perempuan menerima uang, beras, dan rumah sedangkan pihak laki-laki mendapat 2/3 harta warisan dan harta warisan bebas diberikan dalam bentuk apa saja⁷²

Dengan diberikannya harta warisan melalui upacara *Mebat & Mangindahani* sudah memberikan kebahagiaan tersendiri terhadap perempuan karena mereka mendapat bagian dari harta orangtuanya. Upacara *Mebat & Mangindahani* merupakan upacara yang diyakini pihak perempuan adalah sebagai cara mereka mendapatkan harta warisan dari orangtuanya. Namun bagi beberapa perempuan yang orangtuanya menyekolahkan dirinya sampai sarjana turut senang, walaupun tidak mendapat harta warisan karena perempuan mengetahui, bahwa orangtuanya menyekolahkan dengan menjual tanah/lahan/ladang untuk memperoleh uang. Ada falsafah Batak Toba yang mengatakan *Anakkon Hi Do Hamoraon di au* artinya anakku adalah

⁷² Wawancara dengan Bapak Arifin Simamora, Petuah adat di Pintu Pohan meranti. Senin 11Desember 2108. Pukul 19.00 Wib.

harta yang paling berharga/Indah dalam hidupku. sehingga orangtua di masyarakat Batak Toba lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya, baik perempuan dan laki-laki sampai Perguruan Tinggi agar kelak mereka dapat bekerja dan memperoleh kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengharapkan harta warisan dari orangtuanya. Tidak ada kata menyerah untuk membela anak, itulah sebabnya orang tua akan berjuang sampai nafas terakhir, untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya.

Petuah adat yang berada di lingkungan Pintu Pohan Meranti juga menjelaskan bahwa tradisi *Mebat* dan *Mangindahani* adalah tradisi yang diwarisi secara turun menurun dan sampai sekarang masih dipakai sebagai tatanan dalam membagi harta warisan. Kedua upacara tersebut dilakukan sebagai bentuk warisan kepada anak perempuan yang diharapkan warisan yang diberikan dapat membantu kelangsungan hidup anak perempuannya dan sebagai sebuah simbol bahwa anak perempuannya merupakan klan/marga dari orangtuanya.

Pendapat Bapak Rusman Marpaung yang menyatakan bahwa Pihak perempuan haruslah menerima pemberian sesuai keinginan orangtuanya. Seberapapun yang diberikan haruslah diterima dengan lapang dada, karena dalam tradisi Batak harta warisan diberikan ke pihak perempuan karena akan menjadi sejarah. Bila suatu hari ladang/sawah tersebut akan dijual maka harus menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang mewarisi. Warisan ini tidak dapat diperjualbelikan kepada orang lain ketika pihak keluarga mampu membeli maka harus dibeli, jika pihak keluarga tidak sanggup untuk membeli

maka dapat di perjualbelikan, harus melalui kesepakatan semua pihak dalam keluarga.⁷³

Menurut Bapak Tinglof Simangunsong pembagian harta warisan yang tidak setara ini telah menjadi minset di semua orang Batak Toba bahwa anak perempuan mendapat 1/3 dari harta warisan, sedangkan anak laki-laki mendapat 2/3 dari harta warisan. Pihak perempuan tidak dapat membawa harta warisan secara sembarangan, jadi harus melalui pengetahuan dari pihak laki-laki dan melakukan kompromi. Sehingga dapat dikatakan bahwa upacara *Mebat & Mangindahani* sebagai bentuk upaya memperoleh harta warisan bukan hanya semata-mata dilakukan untuk memberikan harta warisan oleh orangtua kepada anak perempuannya. Akan tetapi harta warisan yang hanya 1/3 dan harus berbentuk lahan, ladang, tanah diberikan agar anak perempuannya tidak melupakan bahwa dia adalah termasuk dari klan ayahnya. Sehingga pada saat orangtuanya telah meninggal dunia, maka pihak perempuan dapat memberitahu bahwa ia adalah bagian dari klan ayahnya dengan menunjukkan bukti sertifikasi bahwa ia mendapatkan 1/3 bagian tanah, lahan, ladang yang diberikan kepadanya pada saat kedua orangtua perempuan tersebut masih hidup.

Pemberian harta warisan kepada pihak perempuan yang dilakukan melalui upacara *Mebat & Mangindahani* bukan hanya sebuah cara untuk memperoleh harta warisan, namun digunakan sebagai perempuan juga untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa ia juga termasuk dari klan ayahnya

⁷³ Wawancara dengan Bapak Rusman Marpaung, Petuah adat di Pintu Pohan Meranti, Senin 12 Desember tahun 2017. Pukul 10.00 Wib.

dan ia dapat mengatakan bahwa dengan upacara Mebat atau Mangindahanilah ia memperoleh harta warisan itu. Tradisi sudah dan selalu diwarisi secara turun menurun di tengah masyarakat adat Batak Toba.

Jika mencermati apa yang terjadi di tengah masyarakat Pintu Pohan Meranti bahwa telah menjadi tradisi bahwa seorang perempuan telah mendapat harta warisan dari orangtuanya namun yang menjadi ketidakpuasan dan ketimpangan buat mereka adalah, mereka hanya mendapat 1/3 bagian tidak sama dengan anak laki laki. Terjadi ketimpangan dalam pembagian harta warisan adat Batak Toba, akan tetapi sejauh ini kebanyakan masyarakat masih menerima, sehingga peraturan adat ini terus berjalan dan membuat orangtuanya memberikan harta warisan kepada anak perempuan secara hibah (hibah adalah harta diberikan sewaktu orang tua masih hidup).

Perbedaan cara pemberian harta warisan inilah yang membuat di Indonesia belum mencapai kata keseragaman, dengan masih banyaknya daerah di pelosok Nusantara yang masih menganut dan menjadikan tata upacara adat istiadat sebagai pandangan hidup. Mengingat Batak Toba juga mempunyai *Dalihan Na Tolu* yang artinya Tungku yang berkaki tiga, sebagai penopang dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Penulis berpendapat bahwa lingkungan Pintu Pohan Meranti masih sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan akan adat istiadat yang diwarisi para leluhur sehingga ketika penulis menyampaikan aspirasi nya kepada petuah adat mengenai bahwa sudah seharusnya keberadaan anak perempuan diakui dan diberikan harta warisan yang sama dengan anak laki-laki, akan

tetapi para petuah adat menyangkal dan mengatakan bahwa mereka hidup di negara yang diatur oleh tatanan hukum akan tetapi mereka tidak akan serata meninggalkan tatanan hukum adat yang berlaku karena dianggap hukum adat istiadat yang ditinggalkan oleh para leluhurnya sangat cocok dan secara berkesinambungan hidup di dalam diri mereka masing-masing.

Hal itu terlihat dari pendapat Bapak Rusman Marpaung yang mengatakan bahwa, segala bentuk pemberian warisan haruslah sesuai tatanan adat yang berlaku di tengah masyarakat, jika tidak sesuai dengan tatanan adat maka tidak dapat diberikan secara sembarangan. Tatanan adat yang dimaksud adalah harus dihadiri oleh petuah adat dan pihak-pihak sebagai saksi dalam upacara *Mebat & Mangindahani*. Meminta *Ulosnasoraburuk* yaitu warisan berupa tanah darat/ sawah, tidak boleh berbentuk uang karena dilarang oleh adat. Pendapat Bapak Tinglof Simangunsong yang mengatakan pernah terjadi perseteruan diantara anak Tumpal Dorianus Pardede mengenai pembagian harta, karena anak perempuannya ingin pembagian harta warisan diberikan secara sama rata. Namun yang terjadi bahwa adat Batak tetap menjadi acuanya, sampai sekarang tidak ada kelanjutan kasus tersebut.⁷⁴

Pendapat dari Bapak Tinglof Simangunsong menunjukkan bahwa hukum adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat, dianggap sebagai sebuah pedoman hidup bagi mereka, karena dengan adat yang berlaku inilah dapat menjalin keharmonisan dalam hidup akan tetapi mereka juga tidak

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Tinglof Simangunsong, Petuah adat di Pintu Pohan Meranti, Jumat 15 Desember 2017. Pukul 18.00 Wib.

menyampingkan aturan hukum yang diatur oleh negara, jika menurut mereka itu baik buat mereka.

Perlu diketahui bahwa penerimaan harta warisan secara hibah oleh orangtuanya kepada anak perempuan yang dilahirkannya dianggap sah oleh masyarakat adat di Pintu Pohan Meranti, sehingga tidak ada dari pihak perempuan yang mencoba untuk berusaha mendapatkan harta warisan yang sama dengan laki-laki karena dianggap melawan hukum adat yang berlaku. Namun hal ini akan menjadi berbeda ketika orangtuanya hidup di daerah perkotaan yang beragam budaya, agama dan suku. Akan menjadi sah-sah saja ketika orangtuanya memberikan harta warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, karena mereka hidup bukan lagi dilingkungan pedesaan yang mayoritas masyarakatnya masih mengacu pada peraturan adat istiadat setempat. Melihat pergeseran yang terjadi di tengah masyarakat ketika anak dari suku Batak Toba merantau ke daerah perkotaan, mereka mulai beralih dan mengikuti zaman dalam hal pembagian harta warisan. Mereka tidak lagi mengikuti tatanan adat yang berlaku di daerah, seperti halnya dalam pembagian harta warisan. Sehingga tidak jarang kita temukan anak dari suku Batak yang telah hidup di perkotaan, menerima jumlah harta warisan yang sama dengan laki-laki. Penulis melihat bahwa pergeseran yang seperti ini yang akan membuat sebuah tradisi budaya itu akan hilang mengikuti zaman yang semakin modern.

Berdasarkan situasi tersebut, penulis dapat menarik informasi bahwa bagi mereka yang tinggal di pedesaan, seperti di Kecamatan Pintu Pohan

Meranti masih menjalankan aturan adat dengan memberikan ruang akses kepada pihak perempuan, untuk mendapatkan harta warisan dari orangtua kandunganya lewat upacara *Mebat & Mangindahani*. Upacara yang dilakukan ditengah masyarakat, diketahui oleh pihak keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan yang di kota telah hidup dalam pengaruh situasi budaya, lingkungan baru dan berbeda yang mempengaruhi pola pikir bahwa peranan perempuan semakin diakui dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju di era modrenisasi yang membuat sudah seharusnya ada persamaan derajat antara perempuan dengan laki-laki. Sehingga tatanan adat istiadat yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka akan ditingalkan bagi mereka yang hidup diperkotaan.

2. Perspektif perempuan masyarakat adat Batak Toba terhadap upacara *Mebat dan Mangindahani* sebagai bentuk atau upaya untuk mendapatkan harta warisan dari orangtua.

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Upaya dengan *Mebat & Mangindahani* merupakan sebuah aturan untuk memperoleh hak-hak mereka, yang dianggap sah oleh adat istiadat Batak Toba yang berlaku. Narasumber yang diwawancarai memberikan padangan bahwa ketika menerima harta warisan yang sedikit itu merupakan hal yang wajar dan mereka menerima dengan lapang dada apa yang telah diberikan orangtuanya.

Tabel 3. Upacara Mebat dan Mangindahani

No	Narasumber	Mebat/ Mangindahani berupa	Atas inisiatif sendiri atau orangtua	Alasan memberi atau meminta
1	Ibu Mintauli Tambunan	Mebat berupa Sawah	Diberikan oleh Orangtua	Orangtua memberi sebagai bentuk bahwa anak perempuannya termasuk dari klan orangtuanya.
2	Ibu Hotmauli Doloksaribu	Mebat berupa Sawah	oleh inisiatif sendiri	Meminta diberikan lahan/tanah/sawah agar dapat dipergunakan untuk lahan bertani atau membangun rumah bagi keluarga.
3	Ibu Elida Pangaribuan	Mebat berupa Tanah	Diberikan oleh orangtua	Orangtua memberikan karena adat istiadat yang berlaku demikian.
4	Ibu Tiamin Siagian	Mebat berupa tanah	Diberikan oleh orangtua	Orangtua memberikan agar dipergunakan untuk membangun rumah bagi Ibu Tiamin
5	Ibu Siti Fatima Gultom	Belum menerima harta warisan namun sudah diberitahu orangtua akan menerima Tanah.	Diberikan oleh orangtua	Sebagai bentuk rasa sayang dan sebagai bentuk bahwa anak perempuannya termasuk dari klan orangtuanya
6	Oppung Ayu Doloksaribu	Mangindahani berupa tanah	oleh Inisiatif diri sendiri	Meminta karena melihat orangtuanya mempunyai harta warisan sehingga berinisiatif meminta tanah/lahan/sawah

Sumber: Data Terolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa upacara *Mebat* dapat dilakukan jika orangtuanya berinisiatif memberikannya pada saat pernikahan anak perempuannya seperti yang dialami oleh Ibu Mintauli Tambunan, Ibu Elida Pangaribuan, Ibu Tiamin Siagian yang pada saat pernikahan diberikan atas inisiatif orangtuanya langsung. Sedangkan ibu Hotmauli Doloksaribu meminta harta warisan melalui upacara *Mebat* dengan inisiatif sendiri, dan Oppung Ayu

Doloksaribu juga melakukan Upacara Mangindahani atas inisiatif sendiri mengingat bahwa orangtuanya mempunyai tanah/lahan.

Ibu Mintauli Tambunan, Ibu Hotmauli Doloksaribu, dan Ibu Elida Pangaribuan memperoleh harta warisan melalui upacara Mebat yang diberikan pada saat mereka menikah/kawin. Pemberian harta warisan melalui *Mebat* ini mereka lakukan agar mereka mendapat harta warisan walaupun sedikit namun dapat mereka pergunakan untuk bertani, seberapa besar yang mereka dapatkan diterima secara lapang dada karena mereka juga mengerti bahwa didalam tradisi Batak Toba memang demikian pembagiannya. Kepatuhan terhadap istiadat ini memang telah dilakukin oleh setiap perempuan yang berada dilingkungan Pintu Pohan Meranti sehingga pada saat penulis memberikan masukan agar memperjuangkan harta warisan yang sama besar dengan laki-laki tanggapan dari narasumber tidak ada karena menganggap itu adalah hal yang dilarang adat istiadat. Mereka sadar bahwa laki-laki yang akan menjadi penerus dari marga orangtuanya bukan mereka, mereka hanya perempuan yang akan di nikahkan dengan laki-laki Batak Toba dan akan ikut suaminya kelak, sehingga mereka berpendapat sudah memang pantas bahwa pihak dari laki laki diberikan harta dan kekayaan dari orangtuanya agar dapat melestarikan Marga dari orangtuanya tersebut. Tradisi upacara *Mebat* paling banyak dilakukan karena faktor ekonomi yang membuat para perempuan tidak sanggup untuk melakukan upacara *Mangindahani*, yang dapat mengeluarkan duit lebih banyak, tidak sebanding dengan warisan yang didapatkan.

Sedangkan untuk upacara *Mangindahani* seperti yang dilakukan Oppung Ayu Doloksaribu tidak banyak perempuan di lingkungan Pintu Pohan Meranti yang melakukannya, yang disebabkan oleh biaya yang terlalu mahal dan lingkupnya sangat besar.

Mereka menganggap dengan diberikannya harta warisan walaupun jumlahnya sedikit adalah sebagai bentuk, bahwa mereka juga dianggap dari klan/Marga orangtuanya. Bagi mereka, pola pikir yang berlaku adalah anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukan lah ahli waris dari ayahnya, sehingga anak perempuan hanya memperoleh harta warisan sebagai hadiah dari orangtuanya.

Beberapa pihak perempuan, seperti Ibu Tiamin Siagian dan Ibu Siti Fatima Gultom yang menjadi narasumber, sangat menyesalkan hal ini terjadi pada mereka, ketika mereka hanya mendapat sedikit harta warisan, tidak sebanding dengan apa yang diperoleh oleh laki-laki. Mereka berharap agar terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, berharap agar mendapat bagian harta warisan yang sama besar karena mereka juga terlahir dari orangtua yang sama.

Hal ini terlihat dari pendapat Ibu Tiamin Siagian yang memberikan masukan bahwa seharusnya diberikan harta warisan yang sama rata tanpa ada pengecualian antara laki laki dan perempuan, karena mereka lahir dari rahim yang sama.⁷⁵ Ibu Siti Fatima Gultom yang menyarankan kalau boleh agar diberikanlah pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan,

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Tiamin Siagian, perempuan di Pintu Pohan Meranti, selasa 19 Desember 2017. Pukul 17.00 Wib.

karena bagaimanapun seorang anak mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga dan merawat orangtuanya ketika orangtuanya tua nanti.⁷⁶

Pendapat dari kedua narasumber ini membuktikan bahwa ada ketidakpuasan akan pembagian harta warisan yang didapatkan oleh mereka. Mereka mengharapkan keadilan namun tidak tahu harus berbuat apa, sehingga mereka hanya diam menerima apa yang terjadi dan menjadi kebiasaan di lingkungan.

Ibu Tiamin Siagian dan ibu Siti Fatima Gltom tidak merasa puas karena mereka adalah anak dari rahim orangtuanya dan dilahirkan dalam keluarga yang sama dengan laki-laki, namun dalam hal pembagian harta warisan mereka dibedakan. Perempuan hanya mendapat 1/3 dalam bentuk lahan/tanah/sawah tidak dapat berupa uang/perhiasan/rumah/mobil dll. Harus melakukan upacara *Mebat & Mangindahani* agar dalam proses meminta harta warisan tersebut sesuai dengan tatanan adat istiadat. Anggapan bahwa perempuan tidak sebagai pihak yang akan meneruskan klan dari orangtuanya, namun mengikuti klan dari suaminya yang membuat terjadi ketimpangan. Ketimpangan dalam pembagian harta warisan ini membuat beberapa perempuan mengharapkan supaya mereka dihargai juga didalam keluarga dengan memberikan jumlah harta warisan yang sama, karena perempuan juga pasti akan menjaga orangtuanya ketika sakit atau butuh bantuan. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Fatima Gultom, perempuan di Pintu Pohan Meranti, Minggu 17 Desember 2017. Pukul 14.30 Wib.

dalam segala hal yang terjadi pada orangtuanya, sehingga perlu diberikan juga harta warisan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan.

Pandangan keadilan bagi setiap masyarakat tidak semua sama disuatu tempat bisa saja keadilan itu berdasarkan dari perasaan masyarakatnya sehingga dijadikan sebuah pedoman hukum. Ketika hukum itu berada di lingkungan yang masih sederhana dan tertinggal, maka hukum itu juga berlaku secara sederhana, sedangkan bagi lingkungan yang modern maka ketentuan hukum yang berlaku akan lebih kompleks. Ketertinggalan dan kesederhanaan ini lah yang membuat hukum adat itu hidup dan berlaku sehingga untuk dilakukan pergeseran maka akan sulit.

Masyarakat di kecamatan Pintu Pohan Meranti Khususnya pihak perempuan hanya diam saja dan tidak berani memperjuangkan haknya terhadap warisan, karena kepercayaan akan hukum adat Batak Toba yang masih berjalan sudah menjadi kebiasaan dan pedoman di masyarakat.

Ibu Tiamin Siagian mengatakan;

Sejauh ini saya tidak dapat memperjuangkan harta warisannya karena peraturan adat yang ketat dan mematuhi orangtua sehingga saya hanya menerima sawah/tanah saja. Kelak saya akan memberi harta warisan yang sama besarnya bagi anak laki-laki dan perempuan.

Ibu Siti Fatima Gultom mengatakan;

Saya juga harus melihat bahwa adat yang berlaku disini masih sangat kental sehingga saya hanya mengikuti dan hanya bisa memberikan saran supaya tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.

Hal ini membuktikan bahwa masih ada perempuan Batak Toba yang merasa pembagian harta warisan yang dilakukan dalam adat Batak Toba masih belum cocok.

Namun penulis melihat bahwa kebiasaan adat yang berlaku di masyarakat Pintu Pohan Meranti masih sangat kuat dan pihak perempuan takut untuk mencoba memperjuangkan hak mereka memperoleh harta warisan yang sama besar dengan laki-laki. Ada rasa ketakutan akan dikucilkan dilingkungan masyarakat.

Ibu Tiamin mengatakan;

Akan menyita waktu mereka ketika saya akan mengadu ke pengadilan, lebih baik waktu untuk hal itu saya pergunakan untuk melakukan kegiatan di ladang/sawah.

Ibu Tiamin Siagian, Ibu Hotmauli Doloksaribu dan Ibu Siti Fatima Gultom juga menganggap bahwa jika terjadi perseteruan antara pihak laki-laki dan perempuan di dalam suatu keluarga, akan merasa malu jika warga sekitar mengetahuinya. Sehingga penulis beranggapan bahwa di daerah ini masih banyak warga yang masih menjalankan petuah adat dan menjadikan hukum adat menjadi pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut terlihat bahwa Perempuan di Pintu Pohan Meranti mengharapkan agar sudah seharusnya pembagian harta warisan disamakan antar laki-laki dan perempuan. Karena mereka juga terlahir dari rahim orangtua yang sama dan mempunyai kewajiban yang sama dalam merawat orangtuanya. Harapan agar pembagian harta warisan tanpa perbedaan gender yang diinginkan pihak perempuan.

Namun ada juga beberapa narasumber perempuan yang ketika sudah menerima harta warisan melalui *Mebat & Mangindahani* tidak menginginkan apa-apa lagi, merasa bahwa pemberian yang diberikan orangtuanya sudah terasa cukup. Hal ini terjadi pada Ibu Mintauli Tambunan, Ibu Hotmauli Doloksaribu dan Ibu Elida Pangaribuan. Ibu Hotmauli Doloksaribu juga menambahkan, jika mencoba mendapatkan lebih dari yang diberikan orangtuanya, maka akan merusak tatanan adat dan malu jika orang disekitar mengetahuinya. Pihak perempuan tidak egois, karena mereka tahu jika pihak laki-laki lah yang akan meneruskan klan orangtuanya, sehingga perempuan merasa wajar ketika laki-laki mendapat bagian lebih banyak.

Ketika penulis menanyakan apakah yang perempuan harapkan dalam pembagian harta warisan yang berlaku di dalam adat Batak Toba, hanya sedikit yang mengharapakan, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagiannya di kemudian hari, akan tetapi beberapa perempuan yang lainnya merasa bahwa hal ini merupakan aturan adat sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mengharapakan lebih banyak. Perempuan tidak hanya menerima harta warisan dari orangtua, tapi juga menerima *Sinamot* atau *Tuhor ni Boru* adalah mahar (belis) yang harus dibayarkan *paranak* (pihak mempelai lelaki) kepada *parboru* (pihak mempelai perempuan) jika ingin menikah, maka perempuan merasa cukup dan tidak perlu lagi menerima harta warisan yang lebih dari orangtunya.

Beberapa narasumber seperti Ibu Mintauli Tambunan dan Ibu Tiamin Siagian mengatakan banyak perempuan disekitarnya selalu mematuhi apa

yang dikatakan orangtuanya, jika orangtua mengatakan tidak mempunyai harta warisan maka seorang perempuan harus menerima secara lapang dada dan tidak boleh memaksa. Ketika seorang perempuan mengenyam pendidikan sampai sarjana, ada beberapa orangtua yang menganggap bahwa menyekolahkan anak adalah sebuah bagian dari harta warisan. Beberapa narasumber perempuan seperti ibu Mitntauli Tambunan dan Hotmauli Doloksaribu berpendapat bahwa mereka di sekolahkan saja sudah bersyukur sehingga tidak merasa enak untuk meminta harta warisan lagi.

Mengingat Pertumbuhan masyarakat yang semakin modern merujuk pada arah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris maka dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Putusan Mahkamah Agung. Beberapa putusan Mahkamah Agung Tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971 menyatakan bahwa bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta, warisan yang ditinggal pewaris. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1976 Nomor 284K/Sip/1975 menyatakan bahwa telah membenarkan/menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan menurut hukum adat waris baru, istri dan anak perempuan adalah ahli waris. Apabila dilihat kalimat “hukum adat waris baru” bahwa dewasa ini anak perempuan telah diakui sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan/merupakan pertumbuhan hukum adat ke arah persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan putusan

Mahkamah Agung Tanggal 31 Januari 1968 Nomor 136K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Januari 1973 Nomor 528K/Sip/1972 Lembaga Holong Ate ini telah memberikan kesempatan kepada anak perempuan bahwa kedudukannya adalah sama dengan anak laki-laki. Adanya perkembangan dan penerobosan terhadap sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Batak Toba yang berpengaruh terhadap hak warisan maka sekarang anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya.⁷⁷

Hal itu juga diatur dalam UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan;

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Berdasarkan pasal tersebut maka seharusnya kedudukan perempuan sama dengan laki-laki ditengah keluarga, tidak ada perbedaan karena masing-masing berhak dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

⁷⁷ Nainggolan, Sabar, E. T. (2005). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak. Diakses dari eprints.undip.ac.id/15914/1/Torop_Eriyanto_SN.pdf. Pada tanggal 19 Agustus 2017.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan orangtua mempunyai kewajiban dalam perkembangan anak dan mendidik sampai anak besar tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Orangtua mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak laki dan perempuan yang dilahirkan walaupun terjadi putus pernikahan antara keduanya. Dalam kaitannya dengan pewarisan maka, orangtua berkewajiban memberikan pembagian jumlah warisan yang sama rata antara laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama tanpa ada pengaruh budaya atau keadaan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menyatakan, bahwa Negara-Negara harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam

melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

Adanya Pasal 3 ini Negara bertujuan untuk memberikan ruang agar keberadaan perempuan lebih diakui di tengah masyarakat dan diberikan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam pemerintahan dan di lingkungan masyarakat harus dihilangkan untuk menjamin bahwa perempuan juga menikmati hak asasinya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menyatakan, bahwa Negara-negara yang ikut serta harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut: ayat 3 Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, ayat;

1. Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.
2. Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan

laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

3. Negara-negara Pihak menyetujui bahwa semua perjanjian dan seluruh instrumen perdata apapun yang mempunyai akibat hukum yang secara langsung membatasi kapasitas hukum perempuan, harus dianggap tidak ada dan dihapuskan.

Pasal 7 dan 15 ini menjelaskan bahwa Negara harus dapat melindungi perempuan dengan memberikan persamaan antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum. Jadi ketika perempuan datang ke pengadilan dengan kasus pembagian harta warisan, pengadilan harus memberikan bantuan hukum tanpa melihat gender. Pengadilan harus memberikan perlindungan secara adil antara laki-laki dan perempuan tanpa membebankan biaya yang besar kepada para pihak. Pasal ini menekankan agar setiap pengadilan bagi negara yang menganut UU Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menjadi acuan dan bekerja secara profesional dalam mengimplementasikan. Masyarakat Batak Toba yang memberikan harta warisan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena akan merugikan pihak perempuan tersebut. Ketika pihak perempuan yang merasa dirugikan datang ke pengadilan maka, pengadilan sudah seharusnya memberikan bantuan hukum agar bagi

perempuan yang menginginkan pembagian harta warisan yang sama dapat dibantu oleh pengadilan tanpa ada perbedaan gender.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: (h) Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen, pengelolaan, penikmatan, serta pemindah-tanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun berdasarkan pertimbangan nilainya.

Negara wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan, manajemen serta pemindah-tanganan kekayaan. Jadi seorang perempuan juga berhak dalam mengelola hasil dari kekayaan setelah pernikahan sebagai bentuk harta bersama. Ketika pihak laki-laki meninggal dunia maka perempuan berhak juga atas pengelolaan harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun pasal ini belum terimplementasikan di masyarakat Batak Toba karena apabila suami meninggal dunia maka perempuan tidak berhak dalam pemindah-tanganan, sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan penjelasan dan penekanan agar peraturan dan UU yang dikeluarkan harus dijalankan.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung dan Undang-undang ini maka diharapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan ditengah hukum dan masyarakat terealisasikan, namun yang terjadi di tengah masyarakat Batak Toba khususnya di daerah Pintu Pohan Meranti hal ini masih jauh dari harapan karena masih berada pada tatanan adat istiadat yang kental. Pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi para perempuan khususnya di masyarakat yang hidup dipedesaan agar dengan keluarnya UU ini dapat mewujudkan keadilan sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang menyangkut adanya perbedaan gender dilingkungan masyarakat sudah harus dihilangkan agar tidak menjadi kebiasaan. Seperti yang dikatakan Ibu Tiamin Siagian bahwa sudah seharusnya diberikan harta warisan yang sama rata tanpa ada pengecualian antara laki laki dan perempuan karena mereka lahir dari rahim yang sama dan Ibu Tiamin juga mengatakan bahwa kelak akan memberikan harta warisan yang sama besarnya bagi anak laki-laki dan perempuannya.

Pertimbangan terhadap hukum yang lama karena tidak lagi sesuai dengan perasaan masyarakat sekitar maka sudah seharusnya beralih ke hukum yang baru, dengan keluarnya Undang-Undang dan putusan Mahkamah Agung dapat mengangkat hak-hak dari seorang anak perempuan menjadi seorang ahli waris yang diakui didalam keluarga. Apalagi hidup di zaman modrenisasai yang mengharapakan agar terjadi homogenitan/persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.